



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABD. JAMIL SALAM
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 110322

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.125.500.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
2. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 107.000.000
3. Tanah Seluas 612 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, WARISAN Rp. 117.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/112 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 38.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 126.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 43.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.295.700.000
III. HUTANG	Rp.	1.281.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.